

Melacak Kuasa Tato pada Tubuh Perempuan Malaka-Nusa Tenggara Timur selama Masa Penjajahan Jepang

Eventus Ombri Kaho

Universitas Sanata Dharma

matelosban@gmail.com

Abstract

This study aims to uncover the symbolic meaning and power of tattoos on the bodies of Malacca women in East Nusa Tenggara during the Japanese occupation, from the perspective of Iris Marion Young. In the context of Japanese imperialism, tattoos on the bodies of Malacca women were not merely cultural expressions, but also symbolic media of resistance and expression of identity amidst the pressures of imperialist power and patriarchal control. Young's approach to structural goals and objectives is applied to examine how women's bodies, through tattoos, become a means of maintaining identity and agency under a system that dominates and controls women. Using in-depth and historical interview methods, this study shows that tattoos play an important role in strengthening women's resistance to the Japanese power structure. This is motivated by Japan's actions in making women its sexual objects. This study provides a deeper understanding of how Malacca women use their bodies as a medium of resistance against gender injustice and social inequality.

Keywords : *Tattoos, Women's Bodies, Malacca, Japanese Imperialism*

PENDAHULUAN

Periodisasi penjajahan Jepang di Indonesia dapat dikategorikan sebagai periode penjajahan yang cukup singkat namun penuh tekanan. Bahkan, penjajahan Jepang mengubah seluruh wajah masyarakat lokal termasuk peran dan posisi perempuan dalam struktur sosial, misalnya yang terjadi pada para perempuan (anak gadis khususnya) di Malaka, Nusa Tenggara Timur. Bukti lain penjajahan Jepang di Malaka ialah adanya benteng pertahanan milik Jepang yang berada di Pantai Wisata Wemasa, Kecamatan Kobalima, Kabupaten (Ndoen, 2022).



Gambar 1. Benteng peninggalan Jepang di Malaka (Foto: Vxotimor.com)

Di bawah pendudukan Jepang, tubuh perempuan Malaka menjadi situs di mana berbagai dinamika kekuasaan imperialisme, patriarki, dan identitas budaya bertabrakan dan berinteraksi (Nurrahma, 2023). Penjajahan Jepang di Asia Tenggara pada tahun 1942-1945 tidak hanya membawa eksploitasi ekonomi dan militer, tetapi juga penguasaan fisik, terutama terhadap tubuh

perempuan. Tubuh perempuan di banyak wilayah, termasuk Malaka, menjadi objek dari kekuasaan yang represif, baik dalam bentuk kekerasan seksual, pemaksaan, hingga subordinasi. Namun, di tengah situasi yang menekan ini, tato muncul sebagai medium ekspresi yang menawarkan bentuk perlawanan simbolis dan kultural yang penting (Lollo, 2024).

Tubuh perempuan yang ditato di Malaka selama pendudukan Jepang tidak hanya bisa dilihat sebagai situs estetika semata, tetapi juga sebagai medan pertempuran politik dan ideologis. Dalam kasus Malaka, perempuan tidak hanya menjadi korban dari kekerasan langsung, tetapi juga dari berbagai bentuk penindasan kultural yang lebih halus. Jepang berusaha untuk mengontrol dan mendominasi, tidak hanya melalui strategi militer, tetapi juga dengan menggantikan dan menghapus identitas lokal, termasuk tradisi dan ekspresi tubuh seperti tato (Gual et al., 2019). Namun, di sini tato menjadi penting: ia muncul sebagai bentuk resistensi kultural yang secara simbolis menolak upaya kontrol imperialisme terhadap tubuh perempuan sebagai budak seks. Tato, dengan simbol-simbol lokalnya, menegaskan identitas Malaka yang unik dan menjadi cara perempuan mempertahankan otonomi kultural di bawah penjajahan Jepang.

Tato pada tubuh perempuan Malaka dalam konteks ini, menjadi titik awal untuk melihat bagaimana tubuh menjadi arena perebutan kuasa antara penguasa Jepang dan mereka yang dijajah. Untuk melihat persoalan ini, saya menggunakan salah satu pendekatan dari Marion Young, seorang feminisme yang mengembangkan kajian politik tubuh untuk menjelaskan bagaimana tato pada tubuh perempuan berfungsi sebagai perlawanan terhadap kekuatan dominan. Dalam pandangan Young, tubuh perempuan sering kali menjadi objek yang dikendalikan dan diatur oleh norma-norma eksternal, baik itu dalam bentuk aturan sosial patriarki maupun, dalam kasus ini, kekuasaan Jepang (Marion Young, 2005). Jepang tidak hanya berusaha mengontrol wilayah-wilayah di Asia Tenggara secara militer, tetapi juga tubuh dan kehidupan perempuan, yang dipaksa tunduk kepada aturan dan kekerasan yang dikendalikan oleh pihak kekuasaan (Putra et al., 2023). Dalam konteks ini, tato menjadi wujud perlawanan terhadap kontrol tersebut, di mana perempuan Malaka secara aktif menolak untuk sepenuhnya diatur dan dimonopoli oleh kekuasaan imperial Jepang.

Perempuan sering dilihat sebagai pihak yang berada dalam posisi subordinat, terutama dalam masyarakat patriarki yang memperkuat kontrol atas tubuh dan kehidupan perempuan (Bandel, 2016). Dalam penjajahan Jepang, struktur patriarki yang dibawa oleh kekuasaan Jepang berusaha mengukuhkan kontrol ini melalui subordinasi tubuh perempuan. Kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, seperti yang terjadi dalam sistem "*jugun ianfu*" (perempuan penghibur), mencerminkan bagaimana tubuh perempuan dipandang sebagai alat yang bisa dieksploitasi demi kepentingan Jepang (Wargiati et al., 2021a). Tubuh perempuan dijadikan objek yang tunduk pada kekuasaan eksternal, kehilangan otonomi, dan kehilangan hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Dalam kondisi seperti ini, perempuan Malaka dengan tato di tubuh mereka melakukan bentuk perlawanan yang halus tetapi kuat terhadap kekuatan patriarki dan kolonial yang ingin mengendalikan tubuh mereka.

Melalui perspektif Young, tato pada tubuh perempuan dapat dilihat sebagai bentuk kontrol diri (*self-determination*) yang signifikan (Marion Young, 2005). Meskipun tubuh mereka berada di bawah ancaman kekuasaan eksternal, perempuan yang memilih untuk menato tubuh mereka menunjukkan bahwa mereka masih memiliki kendali atas cara mereka mempersepsikan dan mengekspresikan identitas mereka (Laku, 2023). Tato bukan hanya tanda estetika atau budaya lokal, tetapi sebuah bentuk klaim otonomi terhadap tubuh mereka sendiri (T. Purwanti, 2020). Di tengah kekerasan imperial Jepang yang berusaha mengendalikan semua aspek kehidupan, termasuk tubuh perempuan, tato menjadi tanda bahwa meskipun ruang fisik mereka diambil, otonomi simbolis mereka tetap terjaga. Ini adalah tindakan politik tubuh yang sangat relevan dalam analisis Young, di mana perempuan tidak lagi hanya menjadi objek, tetapi subjek yang berjuang mempertahankan otoritas atas tubuh dan identitas mereka (Young, 2022).

Di samping itu, tato berupaya melawan narasi dominan Jepang yang mencoba membentuk identitas masyarakat terjajah sesuai dengan kepentingan penjajah. Kekuasaan Jepang berusaha mengkonstruksi ulang identitas budaya lokal untuk memfasilitasi kekuasaan mereka, menghapus simbol-simbol lokal yang dianggap berbahaya atau menantang otoritas mereka (Galura Gumelar & Mukhroman, 2015). Dalam hal ini, tato menjadi simbol penting dari keberlanjutan tradisi dan identitas lokal yang terus bertahan meskipun berada di bawah kekuasaan Jepang. Perempuan Malaka yang tetap menato tubuh mereka dengan simbol-simbol tradisional menunjukkan bentuk resistensi kultural yang kuat terhadap upaya penghapusan ini. Tato menjadi pengingat bahwa budaya lokal tidak akan dengan mudah terhapus oleh kekuasaan Jepang, bahkan di tengah represi yang sangat intens.

Lebih jauh lagi, tato pada tubuh perempuan di Malaka selama masa penjajahan Jepang juga mencerminkan bentuk solidaritas yang unik di antara perempuan. Melalui tato, perempuan Malaka dapat saling mengenali, berkomunikasi, dan mendukung satu sama lain dalam situasi yang sangat represif. Solidaritas ini, yang diungkap oleh Marion Young sebagai “politik kohesif,” memungkinkan perempuan untuk saling berbagi keberanian dan membangun jaringan resistensi yang tidak selalu terlihat oleh mata penguasa (Young, 2022). Dalam konteks penjajahan, ketika banyak bentuk perlawanan fisik tidak mungkin dilakukan, tato menjadi medium perlawanan kolektif yang efektif dan penuh makna.

Tato pada tubuh perempuan Malaka tidak hanya sebagai fenomena budaya, tetapi juga sebagai bentuk resistensi politik dan kultural yang sangat signifikan. Melalui perspektif pascakolonial dan kajian gender Marion Young, kita dapat melihat bagaimana tato menjadi alat bagi perempuan Malaka untuk melawan kekuasaan Jepang, mempertahankan identitas mereka, dan mengekspresikan solidaritas di tengah kondisi yang sangat represif. Tubuh perempuan, dalam hal ini, tidak hanya menjadi objek yang tunduk pada kontrol eksternal, tetapi juga arena di mana perjuangan untuk kebebasan, otonomi, dan keberlanjutan budaya terus diperjuangkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang berjudul ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan gender yang dipengaruhi oleh pemikiran Iris Marion Young. Metode ini bertujuan untuk memahami bagaimana tato pada tubuh perempuan di wilayah Malaka pada masa penjajahan Jepang tidak hanya merupakan simbol budaya, tetapi juga alat kontrol sosial dan politik yang berfungsi dalam konteks kekuasaan yang brutal sekaligus patriarki. Penelitian ini diawali dengan studi literatur untuk memahami hubungan historis antara tato dan perempuan di Malaka-Nusa Tenggara Timur (NTT) serta bagaimana tato tersebut digunakan selama masa imperial Jepang. Literatur mengenai teori feminisme, khususnya pandangan Iris Marion Young tentang tubuh sebagai lokus kekuasaan sosial, juga digunakan untuk menganalisis hubungan antara tato dan penindasan terhadap perempuan. Young berpendapat bahwa tubuh perempuan sering dijadikan objek kontrol oleh struktur kekuasaan patriarki, dan hal ini diterapkan dalam konteks penjajahan untuk memahami bagaimana tubuh perempuan dijadikan situs kekuasaan (Marion Young, 2005), di mana tato mungkin berfungsi sebagai simbol subordinasi atau resistensi.

Peneliti menggunakan wawancara mendalam dengan perempuan yang memiliki tato, serta data arsip dari masa penjajahan Jepang, untuk memahami pengalaman subjektif perempuan dalam masyarakat Malaka. Pengalaman mereka dianalisis melalui lensa gender untuk mengungkap bagaimana kontrol atas tubuh mereka dikendalikan oleh struktur kekuasaan (baca: Jepang) dan patriarki. Metode analisis ini membantu menelusuri dinamika kuasa yang diterapkan pada tubuh perempuan melalui simbol tato, serta bagaimana perempuan mungkin menggunakan tato untuk menegosiasikan identitas dan posisi mereka dalam masyarakat yang didominasi oleh kekuasaan eksternal. Dengan menggunakan pendekatan feminisme, khususnya dalam pemikiran Iris Marion Young, penelitian ini tidak hanya mengeksplorasi aspek simbolis dan historis tato, tetapi juga

mengungkapkan kompleksitas relasi kuasa yang mempengaruhi kehidupan perempuan selama masa imperialisme Jepang di Nusa Tenggara Timur.

KERANGKA KONSEPTUAL

A. Konsep Tubuh dari Iris Marion Young

Iris Marion Young, melalui karyanya *On Female Body Experience: "Throwing Like a Girl" and Other Essays (Studies in Feminist Philosophy)*, membahas politik tubuh perempuan dengan pendekatan fenomenologis, yaitu bagaimana tubuh perempuan dialami dan dipengaruhi oleh norma sosial serta kekuasaan. Young mengamati bahwa tubuh perempuan kerap diposisikan sebagai objek pasif dalam budaya patriarkal, yang membatasi kebebasan perempuan untuk bertindak dan mengekspresikan dirinya secara penuh. Dalam esainya *On Female Body Experience: "Throwing Like a Girl" and Other Essays (Studies in Feminist Philosophy)*, Young mengkritik asumsi bahwa gerak tubuh perempuan merupakan sesuatu yang "alami." Ia mengajukan argumen bahwa cara perempuan menggunakan tubuh mereka misalnya, melempar bola dengan gerakan yang dianggap "kurang efisien" atau "tidak kuat" dibandingkan laki-laki adalah hasil dari internalisasi norma gender yang membatasi. Norma-norma ini menanamkan rasa takut, keraguan, dan ketidakpercayaan pada kemampuan tubuh perempuan. Tubuh perempuan tidak hanya menjadi alat untuk menjalani kehidupan, tetapi juga menjadi objek yang dikontrol oleh pandangan eksternal, baik melalui standar kecantikan, norma perilaku, maupun ekspektasi sosial. Lebih jauh, Young menggambarkan fenomena ini sebagai bagian dari "politik tubuh," di mana cara perempuan bergerak, duduk, dan berdiri dipengaruhi oleh rasa takut akan penilaian atau ancaman di ruang publik. Politik tubuh ini, menurut Young, adalah manifestasi kekuasaan yang mengontrol ruang dan gerak perempuan. Young juga membahas bagaimana budaya patriarki membatasi pengalaman tubuh perempuan melalui dualisme pikiran dan tubuh. Young menekankan bahwa tubuh perempuan tidak hanya menjadi objek penindasan, tetapi juga memiliki potensi sebagai alat pembebasan. Dengan memahami bagaimana politik tubuh bekerja, perempuan dapat mulai mendekonstruksi batasan-batasan yang selama ini mengungkung mereka. Politik tubuh yang diuraikan oleh Young relevan dalam konteks perjuangan feminisme modern, termasuk dalam isu-isu seperti pelecehan seksual, kontrol terhadap tubuh perempuan melalui regulasi reproduksi, serta representasi tubuh dalam media. Young mengajarkan bahwa pembebasan gender bukan hanya soal mengubah sistem sosial, tetapi juga tentang merebut kembali kepemilikan atas tubuh perempuan. "*Feminist politics, it is assumed, speaks for or in the name of someone, the group women, who are defined by this female gender identity*" (Marion-Young, 2022: pp.34).

"*According to this view, an identity woman that unites subjects into a group is not a natural or social given but rather the fluid construct of a political movement, feminism*" (Marion-Young, 2022: pp.39). Menurut pandangan ini, identitas perempuan yang menyatukan subjek ke dalam sebuah kelompok bukanlah sesuatu yang alami atau sosial, melainkan konstruksi yang cair dari sebuah gerakan politik, feminisme. "*The identity politics position has some important virtues. It rightly recognizes that the perception of a common identity among persons must be the product of social or political process that brings them together around a purpose*" (pp.40). Posisi politik identitas memiliki beberapa keunggulan penting. Posisi ini mengakui bahwa persepsi identitas bersama di antara orang-orang harus merupakan hasil dari proses sosial atau politik yang menyatukan mereka untuk mencapai suatu tujuan.

PEMBAHASAN

Penjajahan Jepang dan Kuasa atas Tubuh Perempuan

Penjajahan Jepang di Indonesia yang berlangsung dari tahun 1942 hingga 1945 tidak hanya menimbulkan penderitaan dalam aspek politik, ekonomi, dan sosial, tetapi juga secara signifikan

mempengaruhi kondisi kehidupan perempuan Indonesia (N. Purwanti, 2018). Salah satu dampak yang paling memilukan adalah kontrol Jepang terhadap tubuh perempuan, yang tercermin dalam berbagai kebijakan, terutama terkait dengan eksploitasi seksual. Pada Maret 1942, Jepang berhasil menduduki Indonesia setelah mengalahkan Belanda. Pendudukan ini membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, karena Jepang memperkenalkan sistem pemerintahan militer yang keras. Jepang, dengan dalih membebaskan Indonesia dari kolonialisme Barat, sebenarnya menerapkan bentuk imperialisme baru yang mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia secara besar-besaran untuk mendukung kepentingan perang mereka di kawasan Asia-Pasifik (Ishak, 2012). Salah satu kebijakan paling mengerikan yang diterapkan oleh Jepang adalah sistem perbudakan seksual yang dikenal sebagai "*Jugun Ianfu*" (wanita penghibur). "*Jugun Ianfu*" adalah istilah yang digunakan untuk menyebut perempuan yang dipaksa menjadi budak seks bagi tentara Jepang selama Perang Dunia II, termasuk di Indonesia (Sari, 2023:52). Ribuan perempuan, terutama dari kalangan pribumi, diambil dari desa-desa mereka dengan berbagai cara, seperti penculikan, tipu daya, dan bahkan melalui kerja paksa yang pada akhirnya memaksa mereka masuk ke dalam "rumah-rumah bordil militer." Perempuan ditempatkan di tempat-tempat yang disebut "*ianjo*" atau rumah pelacuran militer, di mana mereka dipaksa melayani tentara Jepang. Jumlah perempuan yang menjadi korban sangat sulit ditentukan secara pasti, tetapi diperkirakan ribuan perempuan Indonesia menjadi "*Jugun Ianfu*". Perempuan-perempuan ini mengalami penderitaan fisik dan psikologis yang luar biasa, dengan kekerasan seksual yang terjadi secara berulang.

Jepang menggunakan berbagai metode untuk merekrut perempuan-perempuan ini, termasuk melalui bujukan dan janji palsu, seperti menawarkan pekerjaan dengan upah tinggi atau kesempatan belajar. Namun, setelah mereka ditangkap, mereka dipaksa menjalani kehidupan sebagai budak seks. Banyak perempuan yang awalnya tidak tahu bahwa mereka akan dijadikan "*Jugun Ianfu*" hingga akhirnya terjebak dalam situasi yang tidak dapat mereka hindari (Putra et al., 2023).

Di balik kebijakan ini, terdapat struktur patriarki yang kuat di masyarakat saat itu. Perempuan dianggap sebagai objek yang dapat diperlakukan sesuai kehendak penguasa yang sangat patriarki. Masyarakat imperialisme Jepang yang didominasi oleh pria yang sering kali menganggap bahwa perempuan tidak memiliki kontrol penuh atas tubuh mereka sendiri. Hal ini semakin memperburuk penderitaan perempuan yang menjadi korban kebijakan Jepang (Sari, 2023). Pengalaman sebagai "*Jugun Ianfu*" meninggalkan trauma mendalam bagi para korban. Banyak perempuan yang merasa malu dan takut untuk mengakui apa yang telah mereka alami karena stigma sosial yang ada. Setelah perang berakhir, kebanyakan korban "*Jugun Ianfu*" tidak mendapatkan kompensasi atau pengakuan dari pemerintah Jepang (Wargiati et al., 2021b). Banyak dari mereka yang hidup dalam kesunyian, menyimpan kenangan pahit tentang kekerasan yang mereka alami.

Kontrol Jepang terhadap tubuh perempuan selama masa penjajahan merupakan bagian dari strategi militer yang kejam dan tidak manusiawi. Kebijakan "*Jugun Ianfu*" adalah salah satu bentuk eksploitasi seksual yang paling sistematis dalam sejarah perang modern, di mana tubuh perempuan dijadikan alat untuk memenuhi kebutuhan militer (Suliyati, 2018). Dampaknya tidak hanya terasa selama masa perang, tetapi juga berlanjut setelahnya, ketika para korban harus menghadapi trauma fisik, mental, dan sosial yang mendalam. Dalam wawancara penulis dengan nenek Elisabeth Hoar di Malaka mempertegas apa yang sebenarnya terjadi.

“[...] sira mai ne rola oa ma'ak bot tian ne'e sia e. Kalo hedi hai ne rola tebes. Rola ne ba mai hai tian ne. Tan kalo hedi hai ni ratene ra'ak ami seruk ho uma kain. Ami feto sia nola balu mai ba hatu'u e. Telale tula rola ami rodi kabau malae sirak ne'et sia. Ema sia besi malaik ne'et sia nola wain kedas.¹”

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia:

“[...] mereka (Jepang) datang mengambil beberapa anak gadis yang sudah beranjak remaja. Jika tidak ada tato di tubuhnya, maka mereka akan mengambil. Anak-anak remaja yang sudah diambil tidak dikembalikan lagi ke keluarganya. Jika tidak ada tato maka kami dianggap belum menikah. Kami anak-anak perempuan terkadang harus bersembunyi. Jika tidak, maka kami akan dibawa menggunakan kendaraan mereka. Kendaraannya membawa cukup banyak.”

Tak hanya itu, Jepang juga dapat merekrut para perempuan secara massal dengan melakukan penculikan untuk setiap perempuan yang mereka temui jika ia terlihat sehat dan muda (Sari, 2023:58).

Malacca women had struggled to maintain their dignity and honor against sexual slavery when it was colonized by Japan. One of the traditions against sex slavery in the Japanese colonial era is engraved from the tattoos on their bodies. Tattoo as an identity to clarify their status (marital status). If it is tattooed on the feet, it shows that they are not married, while the tattoo on the hand is a married identity. In colonial times, women hid their status by tattooing their arms and legs to declare that they were married. Evidence of this struggle can still be found in the arms and legs of Malacca women aged 60 to 90 years (Lollo, 2024).

Perubahan Makna Tato dalam Konteks Penjajahan Jepang

Tato telah lama menjadi bagian integral dari budaya berbagai masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dalam banyak masyarakat adat di Indonesia, tato digunakan sebagai simbol status sosial, kepercayaan spiritual, atau bahkan keberanian dan pencapaian dalam hidup (Lestari, 2014:3). Namun, makna tato mengalami perubahan besar ketika Indonesia, bersama dengan banyak wilayah di Asia berada di bawah pendudukan Jepang selama Perang Dunia II. Penjajahan Jepang membawa perubahan sosial, politik, dan budaya yang signifikan, dan ini termasuk cara pandang terhadap seni tubuh seperti tato. Mereka (Jepang) memandang tato sebagai tanda ketidakpatuhan, kekerasan, atau bahkan ancaman terhadap stabilitas pemerintahan kolonial mereka. Dari simbol spiritual dan sosial yang semula dihormati, tato dalam konteks penjajahan Jepang mulai dihubungkan dengan elemen-elemen kriminalitas, perlawanan, serta kontrol sosial (Susilo & Kodir, 2016).

Sebelum kedatangan Jepang, tato sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat adat di beberapa wilayah Indonesia. Suku Dayak di Kalimantan, misalnya, memiliki tradisi tato yang sangat kaya dan bermakna (Driyanti, 2011). Bagi mereka, tato bukan hanya hiasan tubuh, tetapi juga simbol kebanggaan, status sosial, dan pencapaian pribadi. Proses menato tubuh seseorang sering kali berkaitan dengan ritual inisiasi atau penanda keberanian, seperti keberhasilan dalam berburu atau berperang. Begitu juga di suku Mentawai di Sumatra, di mana tato dianggap

¹ Wawancara dengan Elisabeth Hoar di Malaka pada tanggal 20 Mei 2024.

sebagai simbol keindahan, hubungan spiritual dengan alam, dan ekspresi diri yang kuat. Tato dalam budaya Mentawai mencerminkan keterhubungan seseorang dengan leluhur dan roh-roh alam, yang mereka yakini memengaruhi kehidupan sehari-hari. Tato adalah bagian dari perjalanan spiritual dan identitas kultural yang melibatkan keseluruhan komunitas (Driyanti, 2011).

Namun, ketika Jepang menduduki Indonesia antara tahun 1942 hingga 1945, pandangan terhadap tato mulai berubah. Penjajahan Jepang tidak hanya berfokus pada kontrol politik dan ekonomi, tetapi juga mengintervensi budaya lokal, termasuk cara orang-orang memandang tato dan praktik lainnya yang dianggap bertentangan dengan aturan atau ideologi penjajah. Di Jepang sendiri, tato pada masa itu sudah memiliki stigma yang kuat. Tato di Jepang (dikenal sebagai *irezumi*) pada abad ke-19 sering diasosiasikan dengan kelompok kriminal seperti *Yakuza*, atau sebagai hukuman bagi para pelanggar hukum. Selama periode *Meiji* (1868-1912), Jepang berusaha memodernisasi negara mereka dengan mengadopsi nilai-nilai Barat, dan dalam proses itu, mereka mulai mengkriminalisasi banyak praktik tradisional, termasuk tato. Praktik tato, yang sebelumnya di beberapa wilayah Jepang dianggap sebagai simbol keberanian atau spiritualitas, kemudian berubah menjadi tanda kebobrokan moral dan kriminalitas (Fazrin, 2019).

Ketika Jepang melancarkan ekspansi militer ke Asia Tenggara termasuk Indonesia, mereka membawa pandangan ini mengenai tato. Meskipun praktik tato di Indonesia berbeda dengan di Jepang, pemerintah pendudukan Jepang melihat tato di Indonesia dengan kecurigaan yang sama. Pada titik ini, perubahan besar terjadi dalam cara pandang terhadap tato di Indonesia, terutama dalam konteks pengawasan sosial dan represi politik oleh Jepang. Penjajahan Jepang di Indonesia diwarnai oleh penindasan yang ketat, dengan pengawasan sosial yang intens terhadap segala bentuk ekspresi budaya yang dianggap dapat menentang otoritas mereka. Pada masa pendudukan Jepang, tato yang sebelumnya dianggap sebagai simbol kebanggaan kultural atau identitas etnis mulai dihubungkan dengan perlawanan terhadap kekuasaan (Ishak, 2012).

Banyak kelompok perlawanan, seperti gerakan bawah tanah yang melibatkan para pejuang kemerdekaan, mengadopsi tato sebagai tanda identitas yang berbeda dari kelompok yang bekerja sama dengan Jepang. Di beberapa tempat, tato dianggap sebagai bentuk resistensi kultural dan simbol pemberontakan terhadap kekuasaan kolonial (Nugroho, 2018). Misalnya, pada kelompok-kelompok pejuang di pedalaman, terutama yang berasal dari suku-suku yang memiliki tradisi tato kuat seperti Malaka, tato menjadi simbol keberanian dan keteguhan dalam melawan penjajah Jepang (Lollo, 2024). Sementara itu, Jepang terus memandang orang-orang bertato sebagai ancaman potensial, menganggap mereka sebagai pemberontak atau elemen kriminal. Jepang juga memperkenalkan berbagai kebijakan pengawasan yang ketat terhadap para pejuang kemerdekaan dan komunitas adat yang dianggap dapat memicu pemberontakan. Dalam banyak kasus, Jepang menganggap tato sebagai identitas yang memisahkan pejuang dan komunitas adat dari warga yang tunduk pada kekuasaan mereka. Tato, yang dahulu adalah kebanggaan sosial, menjadi tanda yang diawasi dengan ketat dan dikaitkan dengan kelompok-kelompok yang dianggap subversif.

Penjajahan Jepang tidak hanya berdampak pada kota-kota besar di Jawa dan Sumatra, tetapi juga mencapai wilayah-wilayah pedalaman, tempat komunitas adat seperti Malaka. Meskipun Jepang berfokus pada eksploitasi ekonomi dan militer, pengaruh budaya mereka mulai menyusup ke dalam kehidupan masyarakat adat yang sebelumnya terisolasi dari pengaruh kolonialisme Eropa. Praktik tato di Malaka menjadi sasaran kontrol dan dalam beberapa kasus, dianggap sebagai penghalang bagi homogenisasi budaya yang diinginkan oleh Jepang. Bagi komunitas adat di

Malaka, tato yang merupakan bagian penting dari identitas suku di Malaka mulai kehilangan makna spiritual dan sosialnya di bawah tekanan penjajahan. Jepang dengan pandangannya tentang tato sebagai simbol ketidakteraturan dan kriminalitas, mendorong perubahan pandangan di kalangan elit lokal dan kelompok yang bekerja sama dengan pemerintah kolonial. Tato mulai dianggap sebagai sesuatu yang tidak diinginkan atau bahkan memalukan, dan praktik ini perlahan-lahan berkurang di beberapa wilayah (Dewi Savitri, 2017).

Namun, resistensi budaya tetap terjadi. Di banyak komunitas suku di Malaka, tato tetap dipandang sebagai simbol identitas suku dan keberanian, meskipun di bawah tekanan dari Jepang. Dalam konteks ini, tato menjadi cara bagi komunitas adat untuk mempertahankan warisan budaya mereka, meskipun mereka harus melakukannya di bawah radar kontrol yang ketat. Setelah berakhirnya pendudukan Jepang pada tahun 1945, Indonesia memulai perjuangan baru untuk kemerdekaan dan rekonstruksi sosial (Rahma et al., 2020). Meskipun pengaruh Jepang terhadap pandangan tentang tato masih terasa, ada kebangkitan kembali tradisi tato di banyak komunitas adat. Pada era pasca-kolonial, tato mulai dihidupkan kembali sebagai simbol kebanggaan budaya dan identitas etnis.

Di Kalimantan, misalnya, beberapa suku Dayak yang sempat mengurangi praktik tato selama masa pendudukan Jepang mulai kembali mempraktikkan tradisi ini sebagai cara untuk merayakan identitas mereka dan menjaga koneksi dengan sesama. Tato yang semula dipandang sebagai tanda kriminalitas atau pemberontakan selama pendudukan Jepang, kini diambil alih oleh masyarakat lokal sebagai bagian dari proyek dekolonisasi budaya. Kebangkitan tato pasca-pendudukan Jepang juga dipengaruhi oleh gerakan nasionalis yang ingin merebut kembali identitas lokal yang sempat dihapuskan atau ditekan oleh kolonialisme Belanda maupun imperialisme Jepang. Dalam konteks ini, tato kembali mendapatkan maknanya sebagai simbol keberanian, spiritualitas, dan kebanggaan suku sebagai sebuah identitas suku (Hasanah, 2013).

Dalam era modern, tato di Indonesia memiliki makna yang lebih kompleks dan beragam. Selain tetap menjadi bagian dari warisan budaya masyarakat adat, tato juga diadopsi oleh masyarakat urban sebagai bentuk ekspresi seni dan individualitas. Di kota-kota besar, tato tidak lagi hanya terkait dengan kelompok kriminal atau pemberontakan, melainkan dianggap sebagai bentuk seni tubuh yang dihargai (Dewi Savitri, 2017). Namun, pengaruh penjajahan Jepang masih terasa dalam cara sebagian masyarakat Indonesia memandang tato. Stigma yang melekat pada tato sebagai tanda kriminalitas atau ketidaksesuaian sosial tetap ada di beberapa kalangan, meskipun pandangan ini mulai berubah seiring dengan semakin diterimanya tato sebagai bagian dari budaya populer.

Perubahan makna tato dalam konteks penjajahan Jepang di Indonesia mencerminkan bagaimana seni tubuh ini dipengaruhi oleh dinamika politik dan sosial. Dari simbol keberanian, spiritualitas, dan identitas etnis, tato diubah menjadi tanda kriminalitas dan perlawanan di bawah kekuasaan Jepang. Meski begitu, tato juga menjadi simbol perlawanan budaya dan identitas di banyak komunitas adat, terutama yang menolak homogenisasi budaya yang dipaksakan oleh Jepang. Setelah penjajahan Jepang berakhir, tato mengalami kebangkitan sebagai bagian dari proses dekolonisasi budaya di Indonesia. Di era modern, tato telah menjadi bagian integral dari ekspresi budaya dan seni, meskipun warisan penjajahan Jepang dalam pandangan negatif terhadap tato masih dapat ditemukan dalam beberapa aspek masyarakat. Perubahan ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh Jepang terhadap makna dan simbolisme yang terkait dengan tubuh manusia,

tetapi juga menegaskan kemampuan masyarakat lokal untuk merebut kembali simbol-simbol budaya mereka yang hilang.

Tato sebagai Politik Tubuh Perempuan Malaka

Praktik tato di kalangan perempuan di Malaka, Nusa Tenggara Timur, selama masa penjajahan Jepang tidak hanya merefleksikan nilai estetika atau budaya, tetapi juga menyiratkan sebuah bentuk resistensi yang mendalam terhadap kekuasaan dan budaya patriarki. Dalam konteks pasca-kolonial, tato dapat dilihat sebagai salah satu cara perempuan untuk menegosiasikan identitas mereka di tengah dominasi yang menindas. Melalui tato, perempuan Malaka tidak hanya menunjukkan ketahanan terhadap struktur kekuasaan yang mencoba untuk mengontrol tubuh mereka, tetapi juga mengekspresikan otonomi dan kebebasan dalam cara yang mungkin dianggap subversif (Ariyani et al., 2024).



Gambar 2. Perempuan Malaka yang Bertato (Foto: Rikcy Rikardus, 2024)

Pada masa penjajahan Jepang, perempuan sering kali berada di posisi rentan, di mana tubuh mereka menjadi objek kontrol yang ketat. Kebijakan Jepang sering kali mencerminkan pandangan yang merendahkan terhadap budaya lokal, termasuk praktik tato yang dianggap primitif atau barbar (Rahmadani, 2017). Dalam hal ini, tato tidak hanya menjadi bagian dari identitas budaya, tetapi juga menjadi simbol perlawanan terhadap stereotip negatif yang dilontarkan oleh penjajah (Ariyani et al., 2024). Melalui proses pemberian makna baru pada tato, perempuan Malaka berusaha menolak pandangan yang merendahkan dan menciptakan narasi baru yang menegaskan kekuatan dan keindahan dari tubuh mereka sendiri.

Pentingnya perspektif gender dalam analisis ini terletak pada pengakuan bahwa kekuasaan tidak hanya bersifat eksternal, tetapi juga internal. Dalam masyarakat patriarki, perempuan sering kali dihadapkan pada tekanan untuk mematuhi norma-norma yang membatasi ekspresi diri mereka. Tato, dalam konteks ini, berfungsi sebagai bentuk penegasan identitas feminin yang melawan hegemoni patriarki. Ketika perempuan memilih untuk menghias tubuh mereka dengan tato, mereka tidak hanya merayakan warisan budaya mereka, tetapi juga mengekspresikan penolakan terhadap kontrol yang dikenakan oleh norma gender yang kaku. Tato menjadi ruang di mana perempuan dapat menemukan suara mereka dan mengekspresikan keinginan untuk otonomi atas tubuh mereka.

Resistensi yang ditunjukkan melalui tato perempuan Malaka juga dapat dipahami dalam konteks negosiasi kekuasaan. Dalam situasi di mana kontrol kekuasaan dan patriarki bersatu,

perempuan sering kali harus menemukan cara untuk beradaptasi dan berjuang untuk hak mereka. Tato menjadi salah satu bentuk strategi bertahan hidup yang memungkinkan perempuan untuk mengekspresikan identitas mereka dan menantang struktur kekuasaan yang ada. Proses ini menciptakan ruang bagi perempuan untuk merespons kekuasaan dengan cara yang kreatif dan subversif. Tato bukan hanya sekadar hiasan, tetapi juga manifestasi dari ketahanan dan perlawanan terhadap kekuasaan yang menindas. Hal ini dipertegas dalam wawancara saya bersama dalam nene Klara Luruk Be'e di Laenkabuka-Nusa Tenggara Timur.

*“Ami uluk seruk bot a, hatu'u maka'as e kalo ema malae ne'e sia mai. Tan ami seruk ho hedi nia to. Ne an isin sia bo-bot oan ti, nima hedi an isin sia onan ne. Bet ema ne'et sia mai rare rele'u ita e. [...] buat ne rarak be ha'ak halo ba rei e, telale mah rodi ita ba ema sia rain sia onan ne. Ami ne meo hai mah, hedi ne no nain e.”*²

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia:

“Ketika kami masih kecil, kami selalu bersembunyi ketika Jepang datang patrol. Sebab kami belum memiliki tato. Akan tetapi ketika kami mulai tumbuh remaja, kami mulai tato tubuh kami. Agar ketika orang-orang Jepang (baca: tentara) datang, mereka dapat menghindari dari kita. [...] walaupun berdarah, kita tetap melakukan itu. Jika tidak, maka mereka akan membawa kita pergi ke tanah (baca: negara) mereka. Sesungguhnya kami tidak seheroik yang dibayangkan, tetapi kami hanya mengandalkan tato, tato itu memiliki kekuatan.”

Dari sudut pandang pasca-kolonial, praktik tato juga mencerminkan pergeseran makna yang lebih luas dalam konteks sejarah dan budaya (Savitri, 2012). Perempuan Malaka tidak hanya mengadopsi praktik tato dari tradisi lokal mereka, tetapi juga melakukan reinterpretasi yang menantang narasi penjajahan yang mendominasi. Dalam hal ini, tato menjadi simbol perlawanan yang menghubungkan masa lalu dengan perjuangan identitas perempuan di masa kini. Melalui cara ini, tato juga dapat dilihat sebagai alat untuk memperkuat solidaritas di antara perempuan, menciptakan jaringan dukungan yang memperkuat identitas kolektif mereka sebagai individu yang menghadapi tantangan dari berbagai kekuatan yang menindas.

Tato sebagai politik tubuh perempuan Malaka dalam konteks resistensi terhadap penjajahan Jepang dapat dipahami melalui perspektif Marion Young mengenai “*politics of the body*.” Marion Young, seorang feminisme terkemuka, berpendapat bahwa tubuh bukanlah sekadar entitas biologis, tetapi juga medan kekuasaan dan kontrol sosial. Tubuh perempuan, menurutnya, sering kali menjadi situs di mana kekuasaan, ideologi, dan penindasan berlangsung (Marion Young, 2005). Dalam konteks perempuan Malaka pada masa penjajahan Jepang, tato menjadi simbol penting dari resistensi terhadap kekuatan kolonial yang berusaha mengontrol, mengatur, dan mendisiplinkan tubuh perempuan (Caze, 2014).

Selama pendudukan Jepang, perempuan di Malaka, seperti di banyak tempat lainnya di Asia Tenggara, mengalami kekerasan yang sangat sistematis. Tubuh perempuan menjadi objek kekuasaan Jepang, tidak hanya melalui eksploitasi seksual dalam bentuk perbudakan seksual atau “*jugun ianfu*”, tetapi juga dalam bentuk lain dari kontrol fisik dan psikologis. Dalam situasi yang

² Wawancara dengan Klara Luruk Be'e di Malaka pada tanggal 4 April 2023.

sangat represif ini, perempuan Malaka menemukan cara untuk melawan, dan tato menjadi salah satu sarana perlawanan yang paling kuat, meskipun sering kali tersembunyi dan tidak langsung.

Tato pada tubuh perempuan Malaka dalam kerangka teori politik tubuh Young menjadi wujud resistensi terhadap hegemoni Jepang yang berusaha mengontrol tubuh sebagai alat kekuasaan. Menurut Young, tubuh perempuan sering kali menjadi objek yang diatur oleh norma-norma eksternal, yang dalam konteks penjajahan, dimanifestasikan melalui kekerasan, pemaksaan, dan penaklukan oleh kekuatan Jepang (Marion Young, 2005). Namun, dengan memilih untuk menato tubuh mereka, perempuan Malaka secara aktif menolak upaya tersebut. Mereka mengambil kembali kendali atas tubuh mereka, memanfaatkan tubuh sebagai situs perjuangan, di mana makna kebebasan, keberanian, dan otonomi bisa ditegaskan melalui seni tato.

Dalam konteks penjajahan Jepang, di mana perempuan dipaksa untuk tunduk dan kehilangan otonomi atas tubuh mereka, tato menjadi pernyataan radikal. Seni tato, yang mengandung simbol-simbol tradisional Malaka, berfungsi sebagai pengingat akan identitas lokal yang berusaha dihapus oleh penjajah. Perempuan Malaka, melalui tato, menegaskan bahwa meskipun tubuh mereka berada di bawah ancaman fisik, mereka tetap memegang kendali atas siapa diri mereka dan bagaimana mereka ingin direpresentasikan. Ini adalah bentuk perlawanan langsung terhadap upaya dehumanisasi yang dilakukan Jepang. Tato menjadi tanda bahwa perempuan tidak hanya menjadi korban kekerasan, tetapi juga aktor aktif dalam memperjuangkan kebebasan tubuh mereka.

Dalam pandangan Young, politik tubuh juga mencakup bagaimana tubuh perempuan dipandang, dikendalikan, dan digunakan oleh masyarakat patriarki atau kekuatan eksternal (Marion Young, 2005). Dalam hal ini, penjajahan Jepang membawa serta bentuk baru patriarki, di mana tubuh perempuan dikonstruksi sebagai alat produksi dan reproduksi kekuasaan. Namun, tato di tubuh perempuan Malaka justru menolak konstruksi tersebut. Mereka menandai tubuh mereka dengan pola-pola yang memiliki makna lokal, spiritual, dan tradisional, yang tidak sesuai dengan narasi yang ingin diciptakan oleh kekuasaan Jepang. Dengan demikian, tato menjadi cara bagi perempuan untuk mendefinisikan diri mereka di luar kontrol patriarki ala Jepang.

Lebih dari itu, tato juga memungkinkan perempuan Malaka untuk membangun solidaritas di antara mereka, sebagaimana diungkapkan dalam konsep “politik kohesif” yang diuraikan Young (Marion Young, 2005). Solidaritas ini muncul karena tato sering kali berfungsi sebagai penanda identitas kolektif yang menyatukan perempuan dalam perlawanan mereka terhadap penjajahan. Dalam situasi di mana perlawanan fisik terhadap kekuasaan Jepang sangat terbatas, tato memberikan ruang untuk perlawanan kultural yang bersifat kolektif dan simbolis. Perempuan dengan tato yang serupa atau simbol yang sama dapat saling mengenali dan mendukung satu sama lain, menciptakan jaringan perlawanan tersembunyi yang mungkin tidak terlihat oleh mata penjajah.

Politik tubuh perempuan, menurut Young, juga berhubungan dengan bagaimana tubuh menjadi alat untuk menyampaikan makna dan pesan-pesan politik. Dalam konteks perempuan Malaka, tato tidak hanya menjadi bentuk resistensi pribadi, tetapi juga pesan politik yang lebih luas tentang perlawanan terhadap kekuasaan yang semena-mena dan lebih dari itu yakni, tentang kekerasan seksual. Tubuh perempuan yang ditato menjadi medium bagi narasi yang berbeda dari yang coba dipaksakan oleh Jepang dalam narasi yang penuh dengan perlawanan, kekuatan, dan ketekunan dalam mempertahankan identitas dan otonomi diri. Di tengah represi fisik yang

dilakukan oleh Jepang, tato pada tubuh perempuan Malaka adalah perlawanan politik yang sangat signifikan (Amril & Irma, 2015).

Melalui lensa Marion Young, tato perempuan Malaka pada masa penjajahan Jepang menggambarkan bagaimana tubuh bukanlah entitas yang pasif, tetapi ruang aktif di mana kekuasaan diperebutkan dan resistensi berlangsung (Laku, 2023). Tubuh perempuan yang diwarnai oleh tato menolak menjadi objek yang dikendalikan sepenuhnya oleh kekuatan imperialism Jepang, dan malah menjadi subjek dari perjuangan melawan penindasan, baik dalam ranah politik, sosial, maupun budaya.

SIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa praktik tato pada tubuh perempuan Malaka, Nusa Tenggara Timur, selama masa penjajahan Jepang merupakan ruang perlawanan (resistensi) sekaligus representasi kuasa budaya lokal dalam menghadapi dominasi imperialisme. Tato, yang secara tradisional memiliki makna spiritual, identitas sosial, dan estetika, mengalami transformasi makna ketika berhadapan dengan kekuasaan penjajahan Jepang. Pada masa itu, tubuh perempuan menjadi arena simbolik di mana kuasa dan ideologi bertarung. Jepang, melalui kebijakan militer dan kontrol sosial, berusaha mereduksi praktik tato sebagai sesuatu yang dianggap primitif dan tidak sesuai dengan proyek modernisasi Jepang. Namun, bagi masyarakat Malaka, tato tidak hanya sekadar ornamen tubuh, tetapi juga simbol perlawanan terhadap dominasi budaya asing. Tato perempuan berfungsi sebagai medium naratif yang merekam identitas kolektif, memelihara nilai-nilai lokal, dan menegaskan keberlanjutan tradisi di tengah tekanan budaya penjajahan. Tubuh perempuan yang ditato mencerminkan ketahanan budaya serta kemampuan komunitas lokal untuk menegosiasikan makna dalam kondisi direpresi. Praktik tato pada perempuan Malaka di era penjajahan Jepang bukan hanya ekspresi estetis, tetapi juga bentuk politik tubuh. Ia menjadi medium untuk menantang kontrol kekuasaan semena-mena atas tubuh dan budaya, sekaligus menegaskan eksistensi identitas perempuan Malaka sebagai penjaga tradisi dan agen perlawanan. Transformasi makna tato ini memperlihatkan bagaimana perempuan dan tubuh mereka menjadi aktor sentral dalam melestarikan identitas budaya di tengah dinamika kekuasaan imperialisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Amril, O., & Irma, I. (2015). *Aspek psikologis sosial Jugun Ianfu sebagai korban kekerasan seksual pendudukan Jepang di Indonesia*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:202534466>
- Ariyani, S. E., Arif, S., & Ekwardari, Y. S. (2024). Peran Kempetai dalam Proses Perekrutan Jugun Ianfu bagi Tentara Kekaisaran Jepang di Jawa dan Sumatra pada Periode 1942-1945. *Journal of Social Education*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:272021900>
- Bandel, K. (2016). *Kajian Gender dalam Konteks Pascakolonial*. Sanata Dharma University Press.
- Caze, M. La. (2014). Iris Marion Young's Legacy for Feminist Theory. *Philosophy Compass*, 9, 431-440. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:142731655>
- Dewi Savitri, I. (2017). Budaya dan Seni Tato pada Perempuan Timur. *Studi Budaya Nusantara*, 1(2), 20-28. <https://doi.org/10.21776/ub.sbn.2017.oo1.02.03>
- Driyanti, R. (2011). *Makna Simbolik Tato bagi Manusia Dayak dalam Kajian Hermeneutika Paul Ricoeur*. Universitas Indonesia.

- Fazrin, E. (2019). *Wanita dan Tato: Studi Eksploratif Pencarian Sensasi pada Wanita Pengguna Tato di Kota Bandung*.
- Galura Gumelar, R., & Mukhroman, I. (2015). Tato: Representatif Gender dalam Perspektif Feminisme. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 3(1).
- Gual, Y. A., Setyaningsih, F. D., & Bolaer, P. P. (2019). Tato Tradisional Masyarakat Desa Haulasi Kecamatan Miomafo Kabupaten Timor Tengah Utara. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Missio*, 11(1), 178.
- Hasanah, U. (2013). Pembentukan Identitas Diri dan Gambaran Diri (Self Body Image) Pada Remaja Putri Bertato di Samarinda . *Psikoborneo*, 1(2), 102-107.
- Ishak, M. (2012). Sistem Penjajahan Jepang di Indonesia. *Jurnal Inovasi*, 9.
- Laku, S. K. (2023). Tubuh dan Politik: Perspektif Feminis Iris Marion Young. *Jurnal Sosial Humaniora*, 3(2). <https://doi.org/10.26593/jsh.v3>
- Lestari, W. N. (2014). *Fenomena Tato pada Perempuan Anggota Komunitas Tato Palembang*. Universitas Sriwijaya.
- Lollo, F. (2024, August). *Women In A Matriarchal Culture in Malaka*, NTT. Rumahartspace.
- Marion Young, I. (2005). *On Female Body Experience: "Throwing Like a Girl" and Other Essays (Studies in Feminist Philosophy)*. Oxford University Press.
- Ndoen, F. (2022, January 24). Benteng Tua Peninggalan Zaman Jepang di Pinggir Pantai Wemasa - Kabupaten Malaka. *Pos Kupang*.
- Nugroho, H. (2018). The Self-Concept Construction of Tattoo Users (Symbolic Interaction Study of Tattoo Users in Bandar Lampung). *Jurnal MetaKom*, 2(2).
- Nurrahma, E. G. (2023). Menolak Sarkas: Mengenal Secarik Dampak Positif dari Kebijakan Pendudukan Jepang di Indonesia sebagai Sumber Belajar Siswa. *JEJAK: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah*, 3(1), 53-65. <https://doi.org/10.22437/jejak.v3i1.24667>
- Purwanti, N. (2018). Pendudukan Jepang pada Tahun 1942-1945 di Rembang. *Jurnal Noken*, 3(2), 77-94.
- Purwanti, T. (2020). Kuasa Tubuh dan Perlawanan: Anti Politisasi dan Komodifikasi Tubuh Perempuan dalam Ruang Virtual. *Umbara*, 5(2), 141. <https://doi.org/10.24198/umbara.v5i2.29962>
- Putra, B. M., Susanto, H., & Imanita, M. (2023). Perempuan di Bawah Terik Mentari: Jugun Ianfu pada Masa Pendudukan Jepang di Indonesia 1942-1945. *Journal of Social Education*, 4(1), 16-21. <https://doi.org/10.23960/jips/v4i1.16-21>
- Rahma, A. D., Suswandari, S., & Naredi, H. (2020). Jugun Ianfu: Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Pada Masa Pendudukan Jepang di Jawa Barat Tahun 1942-1945. *Chronologia*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:247770103>
- Rahmadani, F. (2017). *Gambaran Praktik Pelacuran pada Masa Penjajahan Jepang Dalam Novel Cantik Itu Luka Karya Eka Kurniawan (Tinjauan Sosiologi Sastra)*. Fakultas Ilmu Budaya.
- Sari, E. (2023). Jugun Ianfu: Wanita Penghibur dan Tentara Jepang 1942-1945. *Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi*, 3(1), 2829-5137. <https://doi.org/10.22437/krinok.v3i1.28238>

- Savitri, D. (2012). *KEJAHATAN PERANG OLEH JEPANG (STUDI KASUS TERHADAP JUGUN- IANFU SEBAGAI HEGEMONI KEBUDAYAAN DI INDONESIA PERIODE 1942-1945)*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:130555691>
- Suliyati, T. (2018). Jugun Ianfu: Derita Perempuan dalam Pusaran Perang. *Kiryoku*, 2(3), 159-167.
- Susilo, D., & Kodir, A. (2016). Politik Tubuh Perempuan: Bumi, Kuasa, dan Perlawanan. *Jurnal Politik*, 1(2), 5. <https://doi.org/10.7454/jp.v1i2.1124>
- Wargiati, L., Fadilah, I. N., Setyawati, B. V. P. D., Shiyam, T. J., & Khodafi, M. (2021a). Jugun Ianfu dan Hegemoni Jepang di Indonesia: Sejarah Perbudakan Seks dalam Narasi Sastra. *SULUK: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Budaya*, 3(2), 150-160. <https://doi.org/10.15642/suluk.2021.3.2.150-160>
- Wargiati, L., Fadilah, I. N., Setyawati, B. V. P. D., Shiyam, T. J., & Khodafi, M. (2021b). Jugun Ianfu dan Hegemoni Jepang di Indonesia: Sejarah Perbudakan Seks dalam Narasi Sastra. *SULUK: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Budaya*, 3(2), 150-160. <https://doi.org/10.15642/suluk.2021.3.2.150-160>
- Young, I. M. (2022). *Iris Marion Young: Gender, Justice, and the Politics of Difference* (M. Ferguson & A. Valls, Eds.). Routledge. www.routledge.com/

Interview:

Wawancara dengan Elisabeth Hoar di Malaka pada tanggal 20 Mei 2024.

Wawancara dengan Klara Luruk Be'e di Malaka pada tanggal 4 April 2023.